BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan semakin meningkatnya frekuensi pengguanan jalan-jalan di daerah oleh kendaran bermotor maka di pandang perlu mengadakan upaya pembangunan prasarana jalan yang lebih baik di samping meningkatkan pendapatan Daerah.

Dengan semakin majunya perekonomian, maka semakin banyak pula pembangunan di daerah-daerah. Selain pembangunan fasilitas umum juga tidak kalah pentingnya pembangunan jalan. Pembangunan jalan sangat penting karena dengan jalan yang rata dan mulus maka dapat memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat.Selain itu tingkat kecelakaan pun bisa sedikit dapat berkurang. Dengan pembangunan prasaranan jalan yang semakin membaik sehingga dapat memperlancar perekonomian dan pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten.

Dalam usaha pembangunan prasarana jalan pemerintah dan masyarakat sering dihadapkan dengan berbagai keterbatasan dan permasalahan pembangunan prasarana jalan,sehingga menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan, untuk itu perlukan adanya pedoman

pertumbuhan dan pembangunan prasarana jalan.

Pembagunan jalan adalah suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola pembangunan jalan yang lebih baik, dengan perbaikan prasarana jalan maka kegiatan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan dan administrasi dapat berjalan dengan lancar.[1]

Beberapa manfaat dari sebuah proyek jalan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :[2]

a. Menurunnya biaya oprasi dari kendaraan yang selama ini telah menggunakan jalan tersebut.
b. Menurunya biaya oprasi kendaraan pada jalan lain karena sebagian kendaran pindah ke jalan yang baru di bagun.
c. Berkurangnya waktu tempuh kendaraan dan penumpang.
d. Meningkatnya penikmat berkendaraan.
e. Mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga jumlah kendaraan yang melewati jalan itu dan jalan lain bertambah.
f. Mungkin juga berkurangnya kecelakaan.

Adanya beberapa dari manfaat tersebut yang tidak mudah dikonversi dalam bentuk uang seperti menigkatan dan berkurangnya kecelakaan. Dalam setudi kelayakan yang sering dikonversi dalam bentuk

---

1 [illegible] Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta 2005, hal 245

uang hanyalah berkurangnya biaya oprasi kendaraan, berkurangnya waktu tempuh kendaraan pada jalan yang dibagun, berkurangnya waktu tempuh kendaraan pada jalan lain, dan berkurangnya waktu tempuh penumpang. Sejalan dengan penghematan dalam waktu tempuh kendaraan maka waktu tempuh penumpang juga di hemat. Degan demikian, penumpang mendapat tambahan waktu untuk melakukan kegiatan produktif lainnya.

Setelah memperhatikan sasaran pembagunan wilayah, pada akhirnya perencana wilayah sampai kepada program atau proyek yang diperkirakan akan menunjang tercapainya sasaran pembagunan wilayah. Program atau proyek jelas memerlukan biaya yang sering melampaui kemampuan dana pemerintah yang tersedia. Oleh sebab itu, program dan proyek perlu diberi skala prioritas. Namun jika belum sampai pada keputusan akhir, pembagunan wilayah harus mengetahui tentang sistem pembiayaan pembagunan di daerah.

Masalah pembangunan prasarana jalan di negara-nagara berkembang pada umumnya dan termasuk Indonesia lebih kompleks dibanding dengan negara lainya di banding dengan negara industri maju. Daerah Klaten terkenal dengan banyanknya tempat wisata diseperti : Candi Sewu,Candi Prambanan, Candi Plasoan, Deles indah dan Rowo Jombor. Dengan perbaikan jalan yang sekarang sedang berjalan maka akan

Seiring dengan berjalannya waktu, Kabupaten Klaten berubah dari wilayah agraris menjadi wilayah industri dan perdagangan maka pemerintah kota melakukan perbaikan dibidang prasarana jalan. Semangat "industrialisasi" telah bangkit di Kabupaten Klaten jumlah industri yang dimiliki 35.767 unit usaha, dengan 155.905 orang tenaga kerja. Dari seluruh unit usaha industri kecil itu, sebagian besar (99,3 persen) berupa industri kecil.

Oleh karena itu pembangunan prasrana jalan merupakan suatu langkah pertama yang cukup logis dalam memajukan Kabupaten Klaten dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pemerintah juga ikut andil untuk memajukan kesejahtraan kehidupan masyatakat terutama dalam pengunaan prasarana jalan.[3]

Namun keadan yang cenderung terjadi ialah adanya indikasi yang kuat yaitu dengan banyaknya jalan yang rusak seperti Desa Mojayan (Kecamatan ceper),Rowo Jombor (Kecamatan Bayat), Jwireng, Cawas, Karang ndowo pedan, sepanjang jalannya banyak terdapat banyak lubang-lubang yang dapat menyababkan kecelakan, sehingga memunculkan permasalahan prasana jalan yang beragam karena prasrana jalan sangatlah penting bagi kelangsungan perekonomian dan transpotasi. Selain itu bahwa semakin berkembanganya suatu kota maka keadaan prasarana jalan haruslah semakin baik dan bagus.

---

[3] [illegible] Jakarta, april 2004, hal. 373

Wilayah Mojayan adalah salah satu wilayah yang masuk dalam pembangunan prasarana jalan, hal ini di karenakan sepanjang jalan Mojayan mengalami kerusakan yang bisa dibilang parah. Keadan jalan wilayah Mojalan banyak yang berlubang-lubang sehingga membuat para penguna jalan tidak merasa nyaman dan merasa terganggu dengan keadan jalan yang seperti ini.

Jalan Mojayan merupakan jalur utama menuju Kota Klaten bagi masyarakat Wilayah Trucuk, Cawas, Pedan, Karangdowo, dan masih banyak lagi. Apabila kerusakan jalan ini tidak segera diperbaiki maka dapat menimbulkan masalah misalnya terhambatnya trasportasi baik itu dari para penggunan jalan maupun masyarakat setempat.

Keadan jalan yang baik dapat mempermudah pertumbuhan perekonomian suatu daerah dan dapat menimbulkan kenyamanan, keamanan dan keindahan bagi masyarakat. Secara umun pembanggunan prasarana jalan merupakan pengembangan jaringan trasportasi yang telah banyak dilakukan berupa peningkatan kwalitas jalan dan jaringan jalan utama menuju Kota Klaten yang dapat dimanfaatkan sebagai pengerak regional dan pengerak lokal yang diharapkan dapat memberikan kelancaran pada sistem trasportasi bagi masyarakat.

Perkembangan jalan di wilayah Kabupaten Klaten sangat di

suatu pelayanan wilayah kabupaten untuk itu perlu adanya pengelolaan sedemikan rupa sehingga dapat menunjang pertumbuhan perekonomian yang semakin maju dan juga dapat menunjang pembangunan perasaran jalan yang sangat membantu kelancaran transportasi di darat.

Kebijakan Membangun dan Memelihara Prasarana dan Sarana jalan Pendukung Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata di Daerah Kabupaten Klaten diarahkan untuk memperbaiki tingkat pelayanan sarana dan prasarana secara efisiensi. Secara lebih spesifik diprioritaskan rehabilitasi berbagai Prasarana dan Sarana mempertahankan fungsi pelayanan membangun Prasarana dan Sarana di daerah dengan prioritas daerah dengan kesenjangan pelayanan paling tinggi memiliki potensi perekonomian, serta daerah perbatasan.

Reformasi dilanjutkan melalui penyempurnaan berbagai peraturan perundangan dan kelembagaan dalam rangka meningkatkan partisipasi swasta, meningkatkan akses mobilitas. Prasarana dan Sarana Pedesaan untuk menggerakkan perekonomian rakyat dan meningkatkan keterpaduan sistem transportasi.

Kebijakan Meningkatkan Penerapan Prinsip-prinsip Pembangunan prasrana jalan yang berkelanjutan diarahkan pada upaya perbaikan terhadap jalan-jalan yang banyak mengalami kerusajakan. Hal ini mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah Daerah Kabupaten Klaten

sehingga menghmbat perkembangan teknologi modern dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat sehingga Daerah Tingkat II berkewajiaban mengadakan pembangunan prasrana jalan daerah dalam wilayahnya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan yang menimbang sebagai berikut :

a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
c. bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya,

d. bahwa agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan keterlibatan masyarakat.

e. bahwa dengan adanya perkembangan otonomi daerah, tantangan persaingan global, dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum pengaturan tentang jalan.

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, berdayaguna dan keberhasilan, serta kebersamaan dan kemitraan.[4]

Laju pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah maka di perlukan perbaikan dan pembaharuan di berbagai bidang salah satunya yaitu prasaran jalan yang semakin hari semakin banyak di gunakan oleh masyarakat setempat maka pemerintah Kabupaten Klaten dituntut untuk menciptakan kenyamanan, keserasian dan keindahan jalan.

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten No 4 tahun 2006-2007 dimana salah satunya menjelaskaan tentang pembangunan prasarna jalan yang bertujuan untuk:

---

[4] www.google.com/undang-undang/indonesia.html (31/08/2007)

a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan yang lebih baik.
c. Mewujudkan peran penyelenggaraan jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan primer serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan hasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem trasportasi yang terpadu.
f. Mewujudkan penggunaan trasportasi yang baik dan terbuka.

Pembangunan prasarana jalan di Klaten ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengingat bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam pemanfatan pengunan prasaran jalan sehingga nyaman buat para penguna jalan. Dengan di berlakukannya kebijakan ini tentu saja berdampak luas baik itu dampak positif maupun dampak negatif dalam pembangunan prasarana jalan ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implemantasi kebijakan pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Klaten berdasarkan perda No. 4 tahun 2006-2007 studi kasus wilayah Mojayan?

implementasi kebijakan pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Klaten berdasarkan perda No. 4 tahun 2006-2007 studi kasus diwilayah Mojayan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Klaten.

b. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan prasaran jalan di Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Penelitian

a. Pembangunan Daerah

Untuk memberikan masukan kepada aparatur pemerintah khususnya Bappeda

b. Ilmu Pengetahuan

Untuk memperkaya referensi dalam bidang pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Klaten.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel berdasrkan konsep dan definisi tertentu. Di dalam bagian ini di kemukakan teori-teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang di lakukan.

Menurut Sofian Efendi, teori adalah unsur penelitian yang penting besar peranannya dalam penelitian, karena dengan unsur inilah peneliti mencoba menerangkan fenomena dan fenomena alami yang menjadi pusat perhatiannya. Lebih lanjut F.N Kerlinger dalam bukunya "Foundation of Behavior Reseatch" yang di kutip Sofisn Efendi, mengemukakan bahwa teori adalah asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan konsep.[5]

1. Proses Kebijakan

Menurut Charles Bullock III, James E Anderson dan David W Braddy, yang pendapatnya dikutip oleh Santoso mengatakan : Proses kebijakan ialah berbagai aktifitas, malalui mana kala kebijaksanaan pemerintah dibuat, proses kebijakan itu terdiri dari enam tahapan, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Pembuatan agenda
3. Pembuatan kebijakan
4. Adopsi kebijakan
5. Penerapan kebijakan
6. Evaluasi kebijakan[6]

Sedang menurut Hogwood dan Gun, yang dikutip oleh Abdul Wahab kebijakan dapat diartikan sebagai suatu proses yang selanjutnya

---

[5] Sofian Efendi dan Matsri Singaribun *"Metode Penelitian Survey"*, LP3, Jakarta, 1989, hal 37.

[6] Agus Santoso, *Kebijakan Negara*, Pioneka Cipta, Jakarta, 1990, hal 23

dikemukakan sebagai berikut :

Kalau kita memandang kebijakan sebagai suatu proses, maka pusat perhatian diberikan tahap-tahap yang biasanya dilalui oleh kebijakan itu pada umumnya, tahap-tahap proses kebijakan tersebut menciptakan isu-isu penyusun agenda pemerintah, perumusan dan isu kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan program-program evaluasi dampak kebijakan, revisi kebijakan.[7]

Dari berbagai pendapat diatas, penulis merumuskan proses kebijakan sebagai rangkaian kegiatan dari keseluruhan proses, bagian berupa perumusan masalah kebijakan, penyusun agenda pemerintahan, pengesahan kebijakan, pelaksanana kebijakan dan evaluasi kebijakan. Adapun model kebijakan menurut Miftah Toha ada tiga yaitu:[8]

a. Model Institusional

Kebijakan negara sebagai hasil kerja lembaga pemerintah. Ciri-ciri model ini adalah :

1. Lembaga pemerintah memberi keabsahan legitimasi
2. Public policy bersifat umum karena menyangkut seluruh warga negara
3. Hanya pemerintah yang dapat memonopoli kekuasaan

b. Model Kelompok

---

[7] Abdul Wahab, *Pengantar Kebijakan Negara*, Rika Cipta, Jakarta, 1990, hal 22.

[8] [illegible], Jakarta, 1983, hal 47

Dalam model ini individu berafiliasi pada kelompok dan lewat kelompok ini maka mamaksakan kepentingan pada pemerintah

c. Model Elite

Asumsinya :

1. Masyarakat terbagi dua golongan yaitu golongan elite dan non elite.
2. Ke duanya memiliki perbedaan yang kontras
3. Mobilitas dari non elite ke elite sangat sulit

2. Implementasi kebijakan

Implementasi secara gramatikal berarti "Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu". Maka implementasi di pandang sebagai suatu proses melaksanakan dari suatu kebijakan, di mana pada saat kebijakan tersebut di implementasikan, akan di terjemahkan ke dalam program-program yang lebih oprasional, dan berbagai macam program tersebut dapat pula di rinci dalam bentuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Dalam proses implementasi berbagai aktifitas terjadi antara lain :

a. Pengadaan sumber daya baik sumber daya alam, teknologi, maupun sumber daya keuangan

b. Interprestasi terhadap kebijakan

[illegible] tindakan untuk melaksanakan

d. Pengkoordinasian (pendayagunaan organisassi publik, keterlibaran lembaga-lembaga lain, koordinasi kegiatan dan lain-lain)

e. Penyediaan jasa layanan.

Menurut Abdul Wahab kesadaran akan arti penting setelah yang sistematik mengenai implementasi kebijakan negara, baru muncul pada tahun 1960-an atau lebih di Amerika Serikat.[9]

Dalam mencapai keberhasilan pelaksanan sebuah kebijakan, tidak terlepas dari penggunanan sarana-sarana yang terpilih seperti yang dikemukakan oleh Hoogerwarf.

Pelaksanana kebijakan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih.[10] Jadi yang perlu diperhatikan dalam pelaksaanan kebijakan adalah tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau tidak pelaksanan berkenaan dengan pembagian potensi diantara aktor-aktor yang terlibat :

1. Efektifitas implementasi kebijakan

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan harus di dukung lembaga yang menjalankan fungsinya dengan jelas.

a. Geografi

Apakah lembaga-lembaga yang ada mempunyai kewenangan di luar

[9] Abdul Wahab, *Pengantar Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 122.

[10] Hogerwarf, *Ilmu Pengetahuan*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal, 157.

daerah yang merupakan wewenang pokonya.

b. Sektor dan integrasi internal

Adakah lembaga yang dapat mengkoordinasikan antara intansi-intansi sektor yang ada.

c. Otonomi

Apakah lembaga tersebut mempunyai otonomi baik dalam arti administrasi maupun keuangan. Semakin besar otonominya semakin efektif lembaga tersebut.

d. Artikulasi

Apakah lembaga tersebut mempunyai kesempatan untuk mengartikulasikan kemampuannya dalam mengatasi masalah yang akan di hadapi. Apakah lembaga tersebut harus berkonsultasi dengan lembaga lain bila menghadapi masalah.

e. Definisi fungsional

Apakah ada pemisah fungsi yang tegas antara peraturan dan pelaksanaan. Untuk lebih mengertahui bukti-bukti dari efektifitas lembaga tersebut.

2. Model-model Implementasi

a). Model yang di kembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn. Menurut mereka implementasi kebijakan yang baik maka harus di penuhi beberapa persyaratan, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan

menimbulkan kendala yang serius

2. Tersedianya waktu dan sumber-sumber yang memadai
3. Perpaduan sumber-sumber yang di perlukan benar-benar tersedia
4. Kebijaksanaan di dasari sebab akibat (kausalitas)
   a. Hubungan bersifat langsung dan kecilnya hubungan saling ketergantungan.
   b. Pemahaman kesepakatan terhadap tujuan dan terdapat perinci dan penempatan tugas.
   c. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
   d. Pihak yang mempunyai wewenang keluasan dapat memuntut dan mendapat kepatuhan sempurna.

b). Model yang di kembangkan oleh Donald V Metter dan Van horn (1997) yang disebut sebagai A Model Polic Implementation Process (model proses implementasi kebijakan). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementer, dan kinerja kebijakan publik.[11]

c). Model yang di kembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier di sebut A Frame For Implementation Analisys (kerangka

analisis implementasi) peran penting dari analisa implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel tersebut dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan di kendalikan
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk menstruktur secara tepat proses implementasinya.
3. Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap kesinambungan dukungan, tujuan yang akan memuat dalam keputusan kebijakan tersebut.[12]

d). Model yang di kembagkan oleh George C. Edwards III implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

> *"The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the strage of policy making between the establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects ".*

Selanjutnya dalam bukunya yang berjudul "*Implementing Public Policy* ", Edward mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur

birokrasi.

" Four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure ".

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, Pemerintah haruslah mentrasmisikannya kepada personal yang terdapat dan perintah tersebut haruslah jelas, akurat dan konsisten.

Dalam konteks implementasi kebijakan, menurut **Edward III (1980,17)** dalam komunikasi terdapat tiga aspek pokok, yaitu: tranmisi, kejelasan, dan konsisten.

(1*) Tranmisi*

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pejabat harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan surat perintah telah dikeluarkan. Namun ada beberapa hambatan yang mungkin timbul dalam mentranmisikan perintah-perintah implementasi tersebut:

1) Pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan (*Disagreement of Implementers)*

2) Distori yang ditimbulkan karena informasi melalui banyak lapisan

hirarki birokrasi *(Distortion may aries as information passes through multiple layers of the bureaucratic hierarchy)*

3) Penangkapan komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan *(Implementers selective perception and disinclination to know about a policy's requirements)*

(2) Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima tapi juga harus jelas. Edward mengidentifikasi terdapat enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjalasan komunikasi kebijakan, yaitu: **(Edward III,1980:26)**

1) Kompleksi kebijakan public
2) Keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok dalam masyarakat.
3) Kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan.
4) Masalah-masalah dalam memulai kebijakan baru.
5) Menghindari akuntabilitas kebijakan.
6) Hakekat pembuatan keputusan judisial.

(3) Konsisten

Jika implementasi akan berlangsung secara efektif, maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Dari beberapa faktor

yang menghasilkan komunikasi yang tidak jelas yang menyebabkan komunikasi yang tidak konsisten **(Edward III, 1980:42),** antara lain:

1) kompleksitas kebijakan publik
2) kesulitan-kesulitan untuk memulai program baru
3) banyaknya tujuan dari berbagai kebijakan

2) Sumberdaya

Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.

" implementation orders may be accurately transmited, clear and consistent, but if there is lack of resources, implementation is likely to be ineffective" (Edward II, 1980:53)"

Sumberdaya yang penting untuk implementasi kebijakan meliputi:

(1) Staf *(Staffs)*. Jumlah staf yang mencukupi dan memiliki skill yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas.

(2) Informasi *(Information)*. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu; 1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, implementor perlu mengetahui apa yang dilakukan; 2) Data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksanaan harus mengetahui apakah orang-orang lain

(3) Wewenang *(Authoriy)*. Wewenang akan berbeda-beda dari satu program keprogram lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang kepengadilan, mengeluarakan perintah kepada jabatan lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintahan di tingkat lebih rendah, membeli barang dan jasa, dan memungut pajak.

(4) Fasilitas-fasilitas *(Facilities)*. Fasilitas-fasilitas melipiti bagunan,perlengkapan, dan perbekalan.

3) Disposisi (Sikap Kecenderungan)

Jika para peleksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembentuk keputusan awal. Demikian juga sebelumnya apabila sikap-sikap dan persepektif implementor berbeda dari pembuatan keputusan, makaa proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Edward III(1980:89)dalam kaitannya dengan hal ini mengatakan:

"If implementers are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as original decision makers intended. But when implementers' attituders or perspectives different from the decision makers the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated" .

Beberapa kebijakan masuk ke dalam *Zone of Indifference* dari para

dengan pandangan kebijakan sustansi para implementor atau kepentingan pribadi atau organisasi mereka. Dalam hal inilah disposisi menimbulkan hambatan terhadap implementasi. Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi kebijakan bila implementor benar-benar tak setutju dengan subtansi suatu kebijakan. Kadang-kadang implementasi dihambat oleh keadaan-keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menangguhkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setujui untuk meningkatkan kemungkian-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda.

Unit-unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kebijakan. Ketidaksepakatan dalam dan antara badan-badan menghalangi kerjasama dan menghambat implementasi dalam suatu bidang kebijakan. Masing-masing badan tertarik mungkin memiliki prioritas-prioritas yang berbeda, dan cara penanggulangan masalah yang berbeda **(Edwar III, 1980:116)**

(4) Struktur Birokrasi.

Menurut Edwad III, ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standard *(Standard Operating Procedures)* dan frakmentasi *(Fragmentatioan)*.

(1) Standard Operating Procedures (SOP)

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman

dalam pekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dari masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar SOP menghambat implementasi.

(2) Fragmentasi

Fagmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi oranisasi birokrasi publik.

Edward III (1980:134) menyatakan frakmentasi adalah penyebaran tanggungjawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. *"Fragmentation is the dispersion for a policy area among several organizational units"*. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Menurur Edward III (1980:137) Frakmentasi berimplikasi terhadap definisi tanggung jawab, dan hal ini akan membuat

koordinasi kebijakan menjadi sulit. Sumber-sumber dan kewenangan yang di butuhkan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif seringkali terdistribusi di antara banyak unit-unit birokrasi. Semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil.

3. Pembagunan jalan

Jalan adalah prasarana yang dibuat oleh pemerintah guna memperlancar trasportasi masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Menurut Siagian,[13] memberikan definisi pembangunan sebagai berikut:

" Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation building)*.

Pengertian lain mengenai pembangunan dikemukakan oleh dua orang wanita yang bernama Carolie Briyant dan Louise White sebagaimana dikutip oleh Taliziduhu Ndraha[14] sebagai berikut: "Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya." Di dalam pengertian tersebut terkandung sedikitnya lima implikasi utama yaitu:

---

[13] [illegible] Pembangunan, Jakarta, 1974, LP3ES, hal. 26

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok *(capacity)*.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan *(equity)*.
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama kebebasan memilih dari kekuasaan untuk memutuskan *(emprowerment)*.
4. Pembangunan berarti mengurangi kemampuan untuk membangun secara mandiri *(sustainability)*.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara yang satu dengan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati *(interdependence)*.

Jelas sekali bagaimana sifat dinamis yang terkandung dalam istilah pembangunan itu, dimana pembangunan mengandung arti berbagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, bangsa atau negara yang menuju kepada hidup di atas kakinya sendiri dan kemampuan untuk berkembang di atas kepribadiannya sendiri tanpa memutuskan atau mengisolasikan diri dengan bangsa-bangsa lainnya yang juga sama-sama termasuk bangsa yang sedang membangun. Di dalam istilah pembangunan juga secara otomatis telah terkandung peranan masyarakat yang bukan

pemerintah.

Pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya mana yang ditempatkan pada posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Di samping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, apakah harus melalui transformasi strukural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumber daya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak mana yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya di antara tiga *stakeholders* pembangunan: negara, masyarakat atau swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal atau nasional. Perspektif yang berbeda juga dapat menyebabkan pemberian perhatian yang berbeda terhadap sumber daya yang ada. Perspektif tertentu lebih memberikan perhatian pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan perspektif yang lain di samping kedua jenis sumber daya tersebut juga mencoba menggali, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya sosial yang sering disebut juga dengan modal sosial atau energi sosial[15].Selain itu, salah satu unsur yang cukup esensial dari proses pembangunan masyarakat adalah adanya proses perubahan.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan alami yang tumbuh dari dinamika masyarakat sendiri, dapat pula merupakan perubahan yang terencana. Sebagai perubahan yang terencana, pada umumnya dikenal adanya target atas perubahan yang diharapkan. Dilihat dari target perubahan yang dikehendaki apakah merupakan perubahan yang sekedar perbaikan dalam beberapa segi kehidupan tanpa harus merombak sistem dan struktur yang ada, ataukah merupakan perubahan yang cukup fundamental sampai pada perubahan struktur dan transformasi sistem yang baru, pendekatan pembangunan masyarakat dapat dibedakan menjadi *improvement Approach,* dan *Transformation Approach.* Walaupun pada awalnya berangkat dari pandangan yang sama, yaitu bahwa perubahan diperlukan karena adanya sesuatu kondisi yang tidak sesuai dengan harapan sehingga perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.[16]

pembangunan prasarana jalan adalah pemanfaatan jalan yang baik sehingga menciptakan keindahan bagi para penguna jalan, serta penyebaran fasilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembagunan jalan sebagai suatu disiplin ilmu sebenarnya lebih banyak dikaji oleh ilmu arsitektur, yang khususnya membahas tentang pembagunan jalan. Pembagunan jalan di gambarkan sebagai sebuah

keseluruh wilayah dan terpadu secara hierarki.

Erat kaitannya antara pembagunan jalan dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam secara efektif alokasi jalan untuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat pada umumnya. Masyarakaat merupakan bagian yang penting dalam program pembagunan jalan. Jalan pada mulanya adalah jalan lokal untuk melayani permukiman di sekitarnya.

Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini jalan banyak yang mengalami kerusakan dan jalan merupakan penghubung alternatif karena penghubung utama sering macet terutama pada jam-jam sibuk. Beberapa tahun terakhir jumlah kendaraan yang melalui jalan bertambah cukup pesat. Akan tetapi pembagunan jalan dianggap sangat penting karena jalan penghubung utama juga sudah cukup padat dan sering macet.[17]

Setiap melakukan pembagunan jalan harus selalu disertai rincian yang detail mengenai pembagunan jalan yang lebih terinci dan berisi tentang perencanaan pemanfaatan pembagunan jalan. Perencanan pembagunan jalan Kabupaten adalah rencana pembagunan jalan yang disiapkan secara teknis.

Untuk pengembagan semua sektor demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan masyarakat serta pertahanan

lainnya yang optimal dengan menganalisis segala aspek dan faktor-faktor pengembangan dan pembagunan jalan.

Indikator kinerja pembangunan jalan merupakan refleksi dari berbagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah serta dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengkajian kebijakan yang dihasilkankan, digunakan oleh pembina jalan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pembangunan jalan serta bagi pengguna (pemanfaat jalan) digunakan untuk melihat sejauh mana prasarana jalan telah mampu memberikan peningkatan kepuasan pelanggan dan di masa yang akan datang, masyarakat baik pengguna maupun pemanfaat akan merupakan komponen yang menentukan dalam keberhasilan pembangunan jalan.

Untuk penyusunan performen indikator jalan komponen dari sub

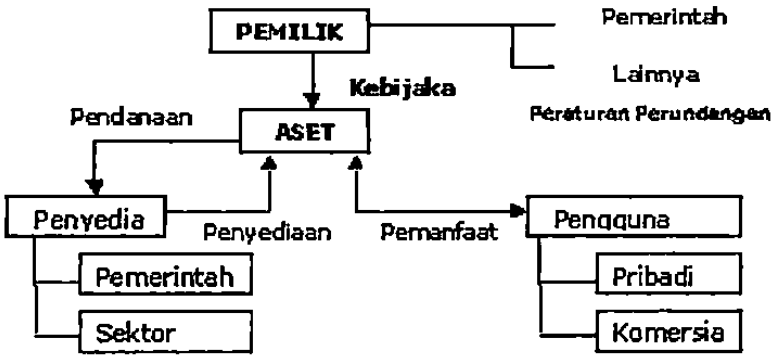

Adapun Indikator Kinerja dari prasarana jalan dapat dilihat pada tabel diatas.

Indikator yang merepresentasikan proses manajemen pembinaan jalan memiliki komponen kualitatif yang tidak mudah untuk disepakati indikatornya, namun demikian berdasar fungsinya, indikator dapat dikembangkan menurut: Penetapan alat analisis, Penyediaan alternatif, Partisipasi masyarakat, Kegiatan evaluasi, Interaksi dengan pasar dan permintaan, Alokasi sumber daya, Manajemen organisasi, serta Penetapan visi, misi, strategi dan kebijakan organisasi.[18]

Selain indikator yang diusulkan dalam jangka pendek tersebut, terdapat pula indikator jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan juga dapat diimplementasikan begitu terdapat kesiapan data dan pelaksana kegiatan..

Jenis jalan yang terdapat di Daerah Klaten yaitu seperti : Jalan

[18] [illegible] (31/08/2007)

Kota, Jalan Umun, Jalan Desa, Jalan Dusun, Jalan Khusus, jalan strategis kabupaten, Jalan strategis provinsi, jalan strategis nasional.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam kegiatan masyarakat hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam masyarakat.. Keikutsertaan warga dalam proses memperbaiki jalan yang banyak mengalami kerusakan. Mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar identitas-identitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan

kemasyarakatan.

. Partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Maka dalam hal ini partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk mencapai suatu keberhasilan suatu kebijakan.

Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan, antara lain :

1. Ikut merawat kondisi jalan yang telah diperbaiki oleh pemerintah
2. Dilarang membuang batu atau pun krikil di jalan.
3. Dilarang membawa barang yang beratnya melebihi batas karena dapat berakikat pada jalan.
4. Menjaga kebersihan dan keindahan jalan agar indah di pandang mata.
5. Adanya kesadaran masyarakat dalam hal menjaga kondisi jalan agar selalu terlihat bagus

E. Definisi Konseptual

1. Proses kebijakan adalah keseluruhan dari tindakan-tindakan yang dinamis sehubungan dengan persiapan, penentuan, pelaksanana, penilain dan pengendalian suatu kebijakan.

berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan

3. pembangunan jalan adalah aktifitas didalam suatu proses kesinambungan yang tidak berakhir dengan pembuatan sebuah jalan, berlanjut dengan tahap-tahap pengambilan keputusan, pemantaian dan pelaksanana dari suatu pembangunan jalan.
4. pembangunan prasarana jalan adalah pemanfaatan jalan yang baik sehingga menciptakan keindahan bagi para penguna jalan, serta penyebaran fasilitas secara tepat dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

F. Definisi Oprasional

Merupakan operasionalisasi variabel-variabel yang sudah di bahas dalam kerangka dasar teori dan definisi konseptual. Menurut Sofian Efendi, definisi oprasional merupakan unsure penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi oprasional yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Komunikasi

Dalam konteks implementasi kebijakan, menurut **Edward III (1980,17)** dalam komunikasi terdapat tiga aspek pokok, yaitu: tranmisi, kejelasan, dan konsisten.

(1) *Tranmisi*

Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan,

perintah telah dikeluarkan. Namun ada beberapa hambatan yang mungkin timbul dalam mentranmisikan perintah-perintah implementasi tersebut.

(2) Kejelasan

Jika kebijakan-kebijakan akan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima tapi juga harus jelas. Edward mengidentifikasi terdapat enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjalasan komunikasi kebijakan, yaitu: **(Edward III,1980:26)**

(3) Konsisten

Jika implementasi akan berlangsung secara efektif, maka perintah-printah pelaksana harus konsisten dan jelas. Dari beberapa faktor yang menghasilkan komunikasi yang tidak jelas yang menyebabkan komunikasi yang tidak komsisten **(Edward III, 1980:42),** antara lain:

2) Sumberdaya

Sumberdaya yang penting untuk implementasi kebijakan meliputi:

(1) Staf *(Staffs)*. Jumlah staf yang mencukupi dan memiliki skill yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas.

(2) Informasi *(Information)*. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu; 1) Informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan, implementor perlu mengetahui apa yang dilakukan; 2) Data tentang

pemerintah. Pelaksanaan harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksananaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.

(3) Wewenang *(Authoriy)*. Wewenang akan berbeda-beda dari satu program keprogram lain serta memiliki bentuk yang berbeda-beda, seperti misalnya: hak untuk mengeluarkan surat panggilan untuk datang kepengadilan, mengeluarakan perintah kepada jabatan lain, menarik dana dari suatu program, menyediakan dana, staf dan bantuan teknis kepada pemerintahan di tingkat lebih rendah, membeli barang dan jasa, dan memungut pajak.

(4) Fasilitas-fasilitas *(Facilities)*. Fasilitas-fasilitas meliputi bagunan,perlengkapan, dan perbekalan.

3) Disposisi (Sikap Kecenderungan)

Jika para peleksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembentuk keputusan awal. Demikian juga sebelumnya apabila sikap-sikap dan persepektif implementor berbeda dari pembuatan keputusan, makaa proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit

Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi kebijakan bila implementor bener-bener tak setutju dengan

keadaan-keadaan yang sangat kompleks, seperti bila para pelaksana menangguhkan pelaksanaan suatu kebijakan yang mereka setujui untuk meningkatkan kemungkian-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda. Unit-unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai kebijakan. Ketidaksepakatan dalam dan antara badan-badan menghalangi kerjasama dan menghambat implementasi dalam suatu bidang kebijakan. Masing-masing badan tertarik mungkin memiliki prioritas-prioritas yang berbeda, dan cara penanggulangan masalah yang berbeda **(Edwar III, 1980:116).**

4) Struktur Birokrasi.

(1) Standard Operating Procedures (SOP)

SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumberdaya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal dari masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personal baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari

(2) Fragmentasi

Fagmentasi berasal dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komisi-komisi legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, dengan kata lain setiap penelitian harus mengunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai macam cara kerja yaitu dari kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan [19].

1. Jenis Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian jenis ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif-Analitis yang artinya data tentang masalah yang diteliti disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dan digambarkan dalam bentuk tulisan secara teliti dan sistematis. Adapun cirri-ciri penelitian deskriptif adalah :

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, masalah-masalah aktual.

---

[19] [illegible] Transito, Bandung hal. 32

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijalaskan, kemudian dianalisis.[20]

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dianggap tepat dalam penelitian ini.

2. Data yang dibutuhkan

Adapun data yang di butuhkan dalam memahami pokok-pokok permasalahan yang diteliti meliputi :

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa keterangan pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak tersebut adalah Ketua Bappeda Tingkat II Klaten beserta aparat terkait.

b. Data sekunder

Yaitu data yang didapat dari buku-buku ilmiah, laporan hasil penelitian, data statistik, media massa dan dokumen yang ada di wilayah Kabupaten Klaten dan Bappeda Daerah Tingkat II Klaten.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Study kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan

teori-teori serta peraturan dan informasi lain yang diperlukan dari buku, literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Study lapangan yaitu mengumpulkan dan meneliti data yang terdapat di Kabupaten Klaten meliputi :

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian.
2. Interview, yaitu memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai implementasi kebijakan pembagunan jalan ditingkat responden yang dipilih adalah :
   a. Ketua Bappeda Tingkat II Klaten.
   b. Salah satu pegawai BPN
   c. Aktifis masyarakat (LSM)

4. Analisis Lokasi Penelitian

Daerah yang digunakan untuk keperluan penelitian adalah daerah Kabupaten Klaten mengingat pembangunan jalan yang relatif tinggi dan sifat jalan harus sesuai dengan fungsi serta pemanfaat jalan yang optimal, maka kegiatan yang mengisinya perlu diarahkan guna mengatasi perkembangan jalan yang lebih baik di masa yang akan datang baik itu pembagunan jalan maupun pembagunan lainnya. Penulis mengadakan penelitian di Daerah Tingkat II Klaten dengan fokus kajiannya mengenai implementasi pembagunan parasarana jalan di Klaten.

5. Unit Analisa Data

a. Bappeda Klaten

b. BPN Klaten

c. Masyarakat

6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian, penulis menggunakan analisa kualitatif dimana data yang diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dalam bentuk kata-kata menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan dan data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka. Data tersebut di peroleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan data penelitian ini di ujikan dengan memperhatikan fasilitas reabilitas